



**PENGARUH KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 11%
TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL PRODUK DAN
PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO DI DESA CIBODAS
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT**

***THE EFFECT OF 11% VALUE ADDED TAX (VAT) INCREASE ON
PRODUCT SELLING PRICE DETERMINATION AND INCOME OF
MICRO BUSINESS ACTORS IN CIBODAS VILLAGE LEMBANG
DISTRICT BANDUNG BARAT REGENCY***

Wiwin Winarti¹, Boyke Nugrahanto²

¹Universitas Wanita Internasional Bandung, Email : wiwin020603@gmail.com

²Universitas Wanita Internasional Bandung, Email : boyke.nugrahanto@iwu.ac.id

*email koresponden: wiwin020603@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1327>

Abstract

The strategic role of MSMEs as drivers of the local economy is vulnerable to changes in fiscal policy, especially the 11% VAT increase which has the potential to increase production costs and reduce people's purchasing power, thus affecting micro business income in Cibodas Village. This study aims to analyze the effect of the 11% Value Added Tax (VAT) increase on product selling prices and the income of micro businesses in Cibodas Village, Lembang District, West Bandung Regency. This research uses a quantitative approach with descriptive and verification methods, survey techniques through Likert scale questionnaires, and linear regression analysis to test the influence of variables partially. The results showed that the 11% VAT increase had a significant effect on selling prices, where businesses tended to increase prices in response to rising raw material costs. In addition, the 11% VAT increase also has a significant effect on the decrease in net income due to a decrease in sales volume and profit margins. In conclusion the 11% VAT increase policy has direct implications for the sustainability of micro businesses, so that price adaptation strategies and policy support that favor MSMEs are needed to remain competitive and sustainable amid fiscal changes.

Keywords: Fiscal Policy; Income; MSMEs; Selling Price; Value Added Tax.

Abstrak

Peran strategis UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal yang rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal, khususnya kenaikan PPN 11% yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan daya beli masyarakat sehingga memengaruhi pendapatan usaha mikro di Desa Cibodas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% terhadap penetapan harga jual produk dan pendapatan pelaku usaha mikro di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan



kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif, teknik survei melalui kuesioner skala Likert, serta analisis regresi linier untuk menguji pengaruh variabel secara parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN 11% berpengaruh signifikan terhadap penetapan harga jual, di mana pelaku usaha cenderung menaikkan harga sebagai respons terhadap meningkatnya biaya bahan baku. Selain itu, kenaikan PPN 11% juga berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan bersih akibat menurunnya volume penjualan dan margin keuntungan. Kesimpulan menyatakan kebijakan kenaikan PPN 11% memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro, sehingga diperlukan strategi adaptasi harga dan dukungan kebijakan yang berpihak pada UMKM agar tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah perubahan fiskal.

Kata Kunci: Harga Jual, Kebijakan Fiskal, Pajak Pertambahan Nilai, pendapatan, UMKM

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis sebagai pilar utama perekonomian nasional di Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja, pengurangan tingkat pengangguran, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan, mencakup wilayah perkotaan maupun pedesaan (Ruswandi et al., 2024). Menurut data BPS (2022), UMKM menyumbang sekitar 97% terhadap total lapangan kerja di Indonesia dan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Peran ini tidak hanya terfokus di kawasan perkotaan yang memiliki akses pasar luas, tetapi juga mencakup wilayah pedesaan yang menjadi basis pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan demikian, keberadaan UMKM tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemerataan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Di tingkat daerah, peran UMKM juga sangat signifikan. Di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, UMKM menjadi penggerak utama ekonomi desa dan sekaligus menjadi instrumen strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya lokal, dan penguatan daya beli komunitas. Namun, karakteristik UMKM yang umumnya memiliki skala usaha terbatas, modal relatif kecil, dan margin keuntungan yang tipis menjadikan sektor ini rentan terhadap fluktuasi biaya produksi, perubahan kebijakan fiskal, serta dinamika pasar membuat UMKM di Desa Cibodas sangat rentan terhadap berbagai tantangan, seperti biaya produksi yang tinggi, persaingan yang ketat, keterbatasan akses kredit, serta beban pajak yang meningkat. Salah satu isu utama yang patut diperhatikan adalah kenaikan tarif Pajak. Pajak merupakan instrumen fundamental dalam sistem pembiayaan negara, berfungsi sebagai sumber pendapatan utama yang menopang keberlangsungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Melalui penerimaan pajak, pemerintah memperoleh kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan program-program sosial yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu kontributor terbesar dalam struktur penerimaan pajak, dengan kontribusi yang konsisten berada pada kisaran 30–35% dari total penerimaan pajak nasional berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai pajak konsumsi yang bersifat tidak langsung, PPN dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi barang maupun jasa, namun beban akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Mekanisme ini menjadikan PPN sebagai instrumen fiskal yang stabil, karena basis pemungutannya bersifat luas dan relatif tahan terhadap fluktuasi ekonomi jangka pendek (Kemenkeu, 2023).

Secara teori ekonomi, penerapan atau kenaikan tarif PPN akan meningkatkan harga jual barang dan jasa apabila beban pajak tersebut dialihkan sepenuhnya kepada konsumen (*tax*



shifting). Dalam kondisi pasar yang elastis terhadap harga, pelaku usaha termasuk UMKM sering kali dihadapkan pada dilema strategis. Peningkatan harga jual berpotensi menurunkan kuantitas permintaan, sementara mempertahankan harga dapat mengakibatkan penurunan margin keuntungan dan berimplikasi pada penurunan pendapatan bersih.

Bagi UMKM, yang umumnya memiliki modal terbatas dan struktur biaya yang relatif kaku, kenaikan PPN dapat menambah tekanan terhadap arus kas dan keberlanjutan usaha. Faktor ini menjadi semakin signifikan di wilayah dengan daya beli masyarakat yang rendah hingga menengah, seperti kawasan pedesaan, di mana konsumen lebih sensitif terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, penyesuaian tarif PPN berpotensi memengaruhi dua aspek utama, pertama penetapan harga jual produk. UMKM harus mempertimbangkan keseimbangan antara penyesuaian harga untuk menutup beban pajak dan mempertahankan daya saing di pasar. Selanjutnya, pendapatan usaha dapat mempengaruhi penurunan margin atau volume penjualan sebagai dampak penyesuaian harga dapat mengurangi total pendapatan yang diperoleh pelaku UMKM (Liu et al., 2022) dan (Zaelani et al., 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan, Salah satu kebijakan fiskal yang memengaruhi dinamika operasional pelaku usaha adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang mulai diberlakukan pada 1 April 2022, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini dirancang untuk memperluas basis penerimaan negara dan memperkuat kapasitas fiskal, namun sekaligus menghadirkan tantangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam hal pengelolaan struktur biaya, strategi penetapan harga jual, dan upaya mempertahankan tingkat pendapatan di tengah sensitivitas daya beli konsumen terutama di daerah pedesaan seperti Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Perubahan kebijakan perpajakan ini dapat berdampak langsung pada keberlangsungan usaha mereka, mengingat usaha mikro sering kali beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis (Odermatt, 2023). Dengan demikian, kajian mengenai pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap penetapan harga jual dan pendapatan UMKM memiliki urgensi strategis, baik untuk memahami dampak kebijakan fiskal pada skala mikro, maupun untuk merumuskan strategi adaptasi usaha yang efektif di tengah perubahan regulasi perpajakan.

PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan mekanisme "pajak atas pajak" yang pada akhirnya dibebankan ke konsumen akhir. Namun, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% ini menuai pro-kontra, karena kenaikan tarif PPN dapat memberikan dampak langsung terhadap biaya operasional pelaku usaha, khususnya UMKM. Keterbatasan modal dan pengetahuan manajerial juga memperbesar risiko UMKM dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal seperti ini. Kenaikan tarif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Kenaikan tarif PPN ini dilatarbelakangi kebutuhan pemerintah untuk menutup defisit anggaran pascapandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, implikasinya tidak merata. Usaha besar mungkin mampu mengoptimalkan rantai pasok atau menyerap biaya pajak, sementara UMKM terutama usaha mikro seringkali tidak memiliki fleksibilitas serupa (Rita & Astuty, 2023).

Table 1. Jumlah UMKM di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa

No	Tingkatan Wilayah	Jumlah UMKM	Sumber Data
1	Kabupaten Bandung Barat	28.536 (2023)	BPS Provinsi Jawa Barat



2	Kecamatan Lembang	8.214 (2022)	Opendata.bandungbarat.go.id
3	Desa Cibodas	283 (2023)	Data Pemerintah Desa Cibodas

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2023), Opendata Bandung Barat(2022) & Data Pemerintah Desa Cibodas (2023)

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun, mencerminkan dinamika perkembangan sektor usaha skala kecil di wilayah tersebut. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 28.536 unit usaha mikro dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Di Kecamatan Lembang, UMKM juga berkembang cukup pesat, dengan jumlah usaha mikro mencapai 8.214 unit pada tahun 2022. Adapun di Desa Cibodas sendiri, terdapat sekitar 283 pelaku usaha mikro, sebagian besar bergerak di sektor kuliner, kerajinan, dan kesenian. Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai komposisi usaha di Desa Cibodas, berikut adalah data jumlah pelaku usaha UMKM berdasarkan subsektor pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa sektor kuliner mendominasi jenis usaha mikro yang berkembang di desa Cibodas.

Table 2. Jumlah Usaha Mikro Berdasarkan Bidang di Desa Cibodas

No	Subsektor	Jumlah Pelaku
1	Aplikasi	1
2	Desain Interior	2
3	Desain Produk	2
4	Fashion	3
5	Kriya (kerajinan Tangan)	3
6	Kuliner (Makanan & Minuman)	218
7	Musik	5
8	Seni Pertunjukkan	3
9	Seni Rupa	1
Jumlah		238

Sumber : Data Pemerintah Desa Cibodas (2023)

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa sektor kuliner mendominasi usaha mikro di Desa Cibodas, mencakup lebih dari 90% total usaha mikro. Sektor ini memainkan peran sentral dalam perputaran ekonomi desa, baik sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga maupun sebagai penyedia kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Namun demikian, usaha mikro di sektor kuliner memiliki kerentanan yang tinggi terhadap fluktuasi harga bahan baku dan kebijakan fiskal pemerintah. Dalam konteks UMKM, kebijakan ini dapat meningkatkan beban operasional karena barang dan jasa yang dikenakan PPN mengalami penyesuaian harga sebagai konsekuensi langsung dari kenaikan tarif pajak tersebut, yang pada gilirannya memengaruhi struktur biaya dan daya saing pelaku usaha. Kenaikan tarif PPN ini berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan pada sektor usaha kuliner, mengingat karakteristik produknya yang memiliki tingkat perputaran penjualan tinggi dan sangat bergantung pada harga jual yang terjangkau serta margin keuntungan yang tipis (Odermatt,2023).

Sebagian besar usaha mikro di Desa Cibodas bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena omzetnya di bawah batas wajib pajak (Rp4,8 miliar/tahun). Meski tidak dikenai kewajiban memungut dan menyetor PPN, mereka tetap terdampak secara tidak langsung.



Kenaikan PPN menyebabkan peningkatan harga bahan baku dan jasa dari pemasok PKP, yang tidak dapat dikreditkan kembali oleh pelaku usaha mikro. Hal ini menambah beban biaya produksi dan mendorong pelaku usaha untuk menaikkan harga jual sebagai kompensasi (Imaobong Judith et al., 2022). Namun, peningkatan harga jual produk berisiko menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi permintaan, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan usaha dan menurunkan pendapatan bersih. Akibatnya, pelaku usaha mikro menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menanggung margin yang lebih kecil. Bila harga jual dinaikkan, daya beli konsumen berisiko menurun, dan bila tetap, pendapatan pelaku usaha menjadi tertekan (Fadhilah, 2023).

Untuk mempertahankan margin keuntungan, usaha mikro di Desa Cibodas kemungkinan akan menaikkan harga jual produk sebagai respons atas kenaikan biaya produksi akibat tarif PPN yang lebih tinggi. Strategi ini berisiko mengurangi daya saing produk, terutama di pasar lokal Desa Cibodas yang sensitif terhadap harga. Konsumen dapat beralih ke produk sejenis yang lebih murah atau mengurangi frekuensi pembelian. Di sisi lain, penetapan harga yang tidak tepat dapat mengikis kepercayaan pelanggan. Fenomena ini memaksa pelaku usaha mikro untuk menyeimbangkan antara efisiensi biaya, kualitas produk, dan harga yang terjangkau tantangan yang semakin rumit di tengah persaingan pasar. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro menjadi kompleks. Di satu sisi, mereka harus menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan, namun di sisi lain, daya saing dan loyalitas konsumen juga menjadi pertimbangan penting. Jika harga dinaikkan terlalu tinggi, konsumen dapat beralih ke produk serupa yang lebih murah, sementara jika tidak menaikkan harga, pendapatan bersih akan menurun karena beban biaya yang meningkat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara harga, kualitas, dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif (Fadhilah, 2023).

Selain harga jual, pendapatan bersih juga menjadi indikator penting dalam menilai keberlangsungan suatu usaha. Khususnya bagi pelaku usaha mikro yang memiliki omset terbatas dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan operasional mereka. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi terhadap margin keuntungan yang relatif kecil. Dalam konteks kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), apabila pelaku usaha mikro tidak mampu mengalihkan beban pajak tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga jual, maka pendapatan bersih mereka akan mengalami penurunan. Penurunan ini tentu berisiko mengganggu kelancaran kegiatan usaha, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, dan biaya operasional lainnya. Sebaliknya, apabila pelaku usaha dapat menaikkan harga jual produknya tanpa menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan, maka pendapatan bersih dapat tetap stabil meskipun terdapat kenaikan beban pajak (Mutiara, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak kenaikan tarif PPN terhadap aspek harga jual atau pendapatan usaha, seperti yang dilakukan oleh Fahmi & Faisal (2023), Pesak et al. (2024), dan Julito & Ramadani (2024). Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih bersifat umum dan tidak secara simultan mengkaji dampak kenaikan PPN terhadap dua aspek utama, yakni penetapan harga dan pendapatan, khususnya dalam konteks pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan seperti Desa Cibodas. Oleh karena itu, terdapat *research gap* yang perlu diisi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan berbasis data lokal.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut terlihat bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 11% memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha mikro. Pelaku usaha menghadapi tekanan untuk menaikkan harga jual akibat peningkatan biaya bahan baku, yang



mana ketidakseimbangan antara harga jual ini menciptakan tantangan serius bagi pelaku usaha mikro dalam mempertahankan kestabilan pendapatan dan kelangsungan usahanya (Rita & Astuty, 2023). Penelitian ini secara khusus difokuskan pada usaha mikro di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kenaikan tarif PPN 11% memengaruhi penetapan harga jual produk dan pendapatan usaha mikro. Oleh karena itu, penting untuk mengukur persepsi pelaku usaha mikro terhadap kebijakan PPN 11% dan dampaknya terhadap harga jual produk serta pendapatan mereka. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai implikasi kebijakan fiskal, khususnya penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha pelaku UMKM di tingkat desa. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi rujukan akademis, tetapi juga dapat berkontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada penguatan sektor UMKM. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat selaras dengan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan, sekaligus mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif (Amelia et al., 2023). Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% terhadap penetapan harga jual produk dan pendapatan pelaku usaha mikro. Data dikumpulkan melalui teknik survei menggunakan kuesioner berskala Likert. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier untuk menguji pengaruh variabel secara parsial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data (Uji Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardize d Residual	Unstandardize d Residual
N		70	70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	3.10139975	3.66522573
Most Extreme Differences	Absolute	.090	.070
	Positive	.064	.070
	Negative	-.090	-.047
Test Statistic		.090	.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan temuan tersebut, diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan signifikansi sebesar 0.200. Berdasarkan nilai signifikansi tersebut, data dikategorikan terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* sebesar $0.200 > 0.05$.



b. Uji Linieritas

Tabel 4. Hasil Uji Linearitas

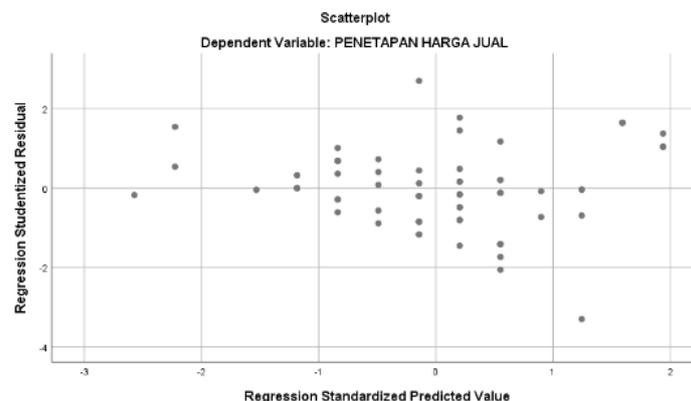
ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PENETAPAN HARGA JUAL * KENAIKAN PPN 11%	Between Groups	(Combined)	281.071	13	21.621	4.148	.000
		Linearity	227.273	1	227.273	43.599	.000
		Deviation from Linearity	53.798	12	4.483	.860	.591
	Within Groups		291.915	56	5.213		
	Total		572.986	69			
PENDAPATAN * KENAIKAN PPN 11%	Between Groups	(Combined)	384.563	13	29.582	1.491	.150
		Linearity	113.281	1	113.281	5.709	.020
		Deviation from Linearity	271.283	12	22.607	1.139	.349
	Within Groups		1111.222	56	19.843		
	Total		1495.786	69			

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji linearitas, nilai signifikansi pada aspek Linearity sebesar 0,000 untuk kedua pasangan variabel menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan secara statistik. Namun demikian, nilai signifikansi pada Deviation from Linearity yang juga berada di bawah 0,05 mengindikasikan adanya penyimpangan dari pola linear murni. Dengan demikian, hubungan antara variabel X1 dengan Y1 dan Y2 belum sepenuhnya memenuhi kriteria linearitas sempurna.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat ketidakhomogenan varians residual di antara pengamatan dalam model regresi. Sebuah model regresi yang valid ditandai oleh ketiadaan indikasi heteroskedastisitas. Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati pola distribusi data pada grafik scatterplot, apakah terdapat pola yang sistematis atau tidak.



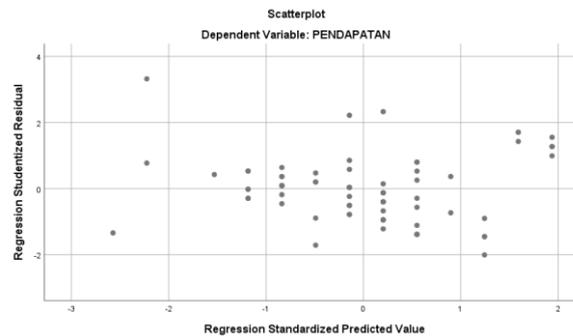
Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Y1

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Analisis scatterplot antara residual studentized dan nilai prediksi terstandarisasi pada variabel dependen Penetapan Harga Jual menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar sumbu horizontal nol, tanpa membentuk pola tertentu seperti penyempitan,



pelebaran, atau lengkungan. Pola penyebaran acak tersebut mengindikasikan bahwa varians residual bersifat homogen di seluruh rentang nilai prediksi. Dengan demikian, tidak ditemukan indikasi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi pada variabel dependen Penetapan Harga Jual, sehingga secara visual dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Y2

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Scatterplot antara residual studentized dan nilai prediksi terstandarisasi pada model regresi dengan variabel dependen Pendapatan Usaha juga menunjukkan pola distribusi titik residual yang acak dan tidak memperlihatkan pola khusus. Titik-titik residual tersebar secara merata di sekitar garis horizontal pada nilai nol, baik pada nilai prediksi rendah maupun tinggi. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi perubahan varians residual secara sistematis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan variabel dependen Pendapatan Usaha juga tidak mengandung gejala heteroskedastisitas, dan asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil scatterplot untuk kedua model regresi (Y1 dan Y2), diperoleh bahwa tidak terdapat pola yang mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Oleh karena itu, asumsi homoskedastisitas dapat dinyatakan bahwa asumsi terpenuhi sehingga model regresi yang digunakan layak untuk dijadikan dasar dalam pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi keberadaan korelasi serial antara residual pada satu observasi dengan observasi lainnya dalam suatu model regresi. Pengujian ini umumnya digunakan pada data *time series*, sehingga pada data berjenis ordinal atau interval, uji autokorelasi tidak menjadi keharusan. Deteksi adanya autokorelasi dilaksanakan dengan merujuk pada nilai Durbin-Watson (DW), dimana pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria berikut:

- Jika $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$, maka terdapat autokorelasi.
- Jika $dU < DW < 4 - dU$, maka tidak terdapat autokorelasi.
- Jika $dL \leq DW \leq dU$ atau $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$, uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive)

Tabel 5. Nilai Durbin-Watson (DW)

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.630 ^a	.397	.388	3.124	1.742	
2	.427 ^a	.182	.170	3.692	1.802	



- | |
|---|
| a. Predictors: (Constant), KENAIKAN PPN 11% |
| b. Dependent Variable: PENETAPAN HARGA JUAL, PENDAPATAN |

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Dari hasil pengolahan data, dapat diperoleh nilai DW sebesar 1,742 pada variabel penetapan harga jual dan 1,802 untuk variabel pendapatan. Nilai du berdasarkan sampel sebanyak 70 responden dan variabel independen berjumlah 1 adalah sebesar 1,64. Maka, diperoleh rentang $du < DW < 4 - du$ yaitu $1,64 < DW < 2,36$. Karena nilai DW kedua model berada dalam rentang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi, baik untuk variabel penetapan harga jual maupun pendapatan.

e. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linier sederhana dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen Kenaikan PPN 11% (X1) terhadap dua variabel dependen, yaitu Penetapan Harga Jual (Y1) dan Pendapatan Usaha (Y2). Hasil analisis regresi linier sederhana tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel Y1

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.804	2.303		3.388	.001
KENAIKAN PPN 11%	.873	.131	.630	6.686	.000

a. Dependent Variable: PENETAPAN HARGA JUAL

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Dari tabel di atas, dapat diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 7,804 dan koefisien regresi variabel kenaikan PPN 11% (b) sebesar 0,873. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk membentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 7.804 + 0,873X + e$$

Konstanta sebesar 7,804 menunjukkan bahwa jika tidak terjadi kenaikan PPN ($X_1 = 0$), maka nilai rata-rata Penetapan Harga Jual adalah 7,804. Koefisien regresi untuk variabel Kenaikan PPN 11% sebesar 0,873 menunjukkan bahwa setiap peningkatan persepsi terhadap kenaikan PPN akan diikuti oleh peningkatan Penetapan Harga Jual sebesar 0,873 satuan. Koefisien regresi yang bernilai positif ini mengindikasikan bahwa pengaruh kenaikan PPN 11% (variabel X) terhadap penetapan harga jual (variabel Y1) bersifat positif. Selain itu, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel kenaikan PPN 11% (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penetapan harga jual (Y1).

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana Variabel Y2

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.669	2.722		4.654	.000
KENAIKAN PPN 11%	.600	.154	.427	3.889	.000

a. Dependent Variable: PENDAPATAN

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025



Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 12.669 dan koefisien regresi variabel kenaikan PPN 11% (b) sebesar 0,600. Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk membentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 12.669 + 0,600X + e$$

Konstanta sebesar 12,669 mengindikasikan bahwa apabila tidak terjadi kenaikan tarif PPN ($X_1 = 0$), maka rata-rata Penetapan Harga Jual berada pada nilai 12,669. Koefisien regresi untuk variabel Kenaikan PPN 11% sebesar 0,600 menunjukkan bahwa setiap peningkatan persepsi terhadap kenaikan PPN akan berimplikasi pada peningkatan Penetapan Harga Jual sebesar 0,600 satuan. Koefisien positif ini menandakan bahwa pengaruh kenaikan PPN 11% (variabel X) terhadap Pendapatan (variabel Y2) bersifat positif. Berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel Kenaikan PPN 11% (X) memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan (Y2).

f. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen Kenaikan PPN 11% terhadap variabel dependen, baik Penetapan Harga Jual maupun Pendapatan Usaha.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Y1

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.630 ^a	.397	.388	3.124	1.742
a. Predictors: (Constant), KENAIKAN PPN 11%					
b. Dependent Variable: PENETAPAN HARGA JUAL					

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Dari hasil Tabel diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,630. Dari hasil tersebut, koefisien determinasi (R Square) tercatat sebesar 0,397, yang mengindikasikan bahwa variabel independen, yakni kenaikan PPN 11%, mampu menjelaskan sebesar 39,7% variasi pada variabel dependen, yaitu penetapan harga jual. Sisanya, yaitu sebesar 60,3%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai R sebesar 0,630 mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kedua variabel tersebut.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel Y2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.427 ^a	.182	.170	3.692	1.802
a. Predictors: (Constant), KENAIKAN PPN 11%					
b. Dependent Variable: PENDAPATAN					

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Dari hasil Tabel diatas menjelaskan bahwa koefisien korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,427. Dari hasil tersebut, koefisien determinasi (R Square) tercatat sebesar 0,182 yang mengindikasikan bahwa variabel independen, yakni kenaikan PPN 11% mampu menjelaskan sebesar 18.2% variasi pada variabel dependen, yaitu pendapatan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 81.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai R sebesar 0,427 mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan yang cukup, meskipun tidak sekuat hubungan pada model pertama.



g. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 10. Hasil Uji t Variabel Y1

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.804	2.303		3.388	.001
KENAIKAN PPN 11%	.873	.131	.630	6.686	.000

a. Dependent Variable: PENETAPAN HARGA JUAL

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji t, diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,686 dengan tingkat signifikansi untuk uji dua arah dan derajat kebebasan (df) sebesar 68 (70 observasi dikurangi 2 variabel). Nilai t-tabel yang diperoleh adalah 1,68. Karena t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 11% memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan harga jual produk usaha mikro di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang.

Tabel 11. Hasil Uji t Variabel Y2

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.669	2.722		4.654	.000
KENAIKAN PPN 11%	.600	.154	.427	3.889	.000

a. Dependent Variable: PENDAPATAN

Sumber: Data Diolah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji t, diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,889 dengan tingkat signifikansi untuk uji dua arah dan derajat kebebasan (df) sebesar 68 (70 observasi dikurangi 2 variabel). Nilai t-tabel yang diperoleh adalah 1,68. Karena t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 11% memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha mikro di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN 11% berpengaruh signifikan terhadap penetapan harga jual maupun pendapatan pelaku usaha mikro di Desa Cibodas. Analisis regresi membuktikan bahwa kenaikan PPN mendorong pelaku usaha menaikkan harga jual sebagai bentuk adaptasi terhadap meningkatnya biaya produksi, sejalan dengan konsep *cost-based pricing*. Namun, meskipun secara statistik hubungan dengan pendapatan bersifat positif, temuan deskriptif menunjukkan mayoritas pelaku usaha merasakan penurunan pendapatan bersih akibat melemahnya daya beli konsumen dan berkurangnya volume penjualan. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pelaku usaha mikro antara mempertahankan margin keuntungan dan menjaga daya saing harga di pasar lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal berupa kenaikan PPN memberi dampak nyata pada strategi penetapan harga dan stabilitas pendapatan, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan pendampingan bagi UMKM agar mampu beradaptasi secara berkelanjutan.



4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% terhadap penetapan harga jual produk dan pendapatan pelaku usaha mikro di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan PPN memberikan dampak yang signifikan terhadap kedua variabel tersebut. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kenaikan PPN 11% berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan harga jual produk, di mana pelaku usaha mikro cenderung menaikkan harga untuk menyesuaikan dengan meningkatnya biaya bahan baku dan operasional. Namun, di sisi lain, kenaikan PPN juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mikro, yang mengalami tekanan akibat turunnya volume penjualan serta margin keuntungan yang lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kenaikan tarif PPN dapat mendorong pelaku usaha melakukan penyesuaian harga, dampaknya terhadap daya beli konsumen justru menimbulkan risiko penurunan pendapatan. Dengan demikian, kebijakan kenaikan PPN 11% memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro, sehingga diperlukan strategi adaptasi harga yang lebih fleksibel, efisiensi biaya produksi, serta dukungan kebijakan dari pemerintah agar pelaku UMKM tetap mampu bertahan dan bersaing di tengah perubahan kebijakan fiskal yang dinamis.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Widyawati, N., Winarni, W., Haryati, T., Sawir, M., Suwandi, S., Arisanti, D., Kasmaniar, K., Santoso, R., Machieu, S. R., Ilham, I., Oktasari, E., Rahma, R., & Wijaya, S. (2024). *Ilmu Administrasi Bisnis: Suatu Pengantar*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

Jurnal

- Al Haq, S., & Bahagiati, K. (2021). Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(1), 443-456. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2402>
- Amalia, M., Azzahra, A., & Rahmawati, S. (2025). Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 2(2), 1-15. <https://edu.pubmedia.id/index.php/ptk>
- Amalia, M. (2025). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235-242.
- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Auliasari, R. P., Nugroho, S. W., & Kurniawan, Y. D. (2025). Pengaruh Kenaikan PPN 11%, Kenaikan Harga Sembako dan Pendapatan terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kota Madiun. *Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(1), 26-45. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>
- Fadhilah, S. N. N. (2023). MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL PRODUK DAN LABA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Minimarket Family Bekasi). <https://doi.org/10.53990/djei.v3i1.227>
- Fahmi, D., & Faisal, R. (2023). Efektivitas Penerapan PPN 11 Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 238-249.



- Imabong Judith, N., Maduabuchi, A. F., Igwe, E. L., Okeke, S. E., & David, C. O. (2022). Taxation Practices and the Survival of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). *Universal Journal of Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100204>
- Kusbiyantoro, S. (2021). Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun. *IQTISHADUNA*, 4(1), 460-473.
- Lili Marliyah. (2021). Hakekat Teori dalam Riset Sosial. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 2(1), 30-37. <https://doi.org/10.31331/jeee.v2i1.1691>
- Liu, Y., Wang, W., & Liu, C. (2022). The Effect of a VAT Rate Reduction on Enterprise Costs: Empirical Research Based on China's VAT Reform Practice. *Frontiers in Environmental Science*. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.912574>
- Natalia, & Fajriana, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235-242. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269>
- Ruswandi, W., Wulandari, R., Juliansyah, E., & Resmanasari, D. (2024). Financial Literacy And Social Capital On Performance For Msme Sustainability. *Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1133–1144.
- Zaelani, R., Akuntansi, & Ruswandi, W. (2020). Analisa Pendapatan Jasa Angkut Barang Dan Beban Usaha Terhadap Laba Usaha pada BMT Darussalam Periode 2019. *Demand*, 02(01), 43–57.